

Pengaruh Sosioekonomi terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat

Nela Hajrianti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

*Corresponding Author, hajriyantunand@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to identify socio-economic factors on the level of compliance with financial statement disclosures in the West Sumatra Provincial Government. In particular, this study examines the effect of regional independence, Prosperity level, and region's size on the level of compliance with the disclosure of regional government financial statements. The unit of analysis in this study is the regional government of West Sumatra, totaling 19 cities/districts in 2018-2020. The results of this study indicate an influence of regional independence, level of welfare, and regional size on the compliance of regional financial statement disclosures in city/district governments in West Sumatra. These results indicate that the socioeconomic factors can be used as a benchmark for disclosure compliance with local government accounting practices.*

Keywords *Regional independence; Prosperity level; Region Size;*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah disusun merupakan pedoman bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangannya. Namun demikian, setelah beberapa tahun ditetapkan, masih ada pemerintah daerah yang belum mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik (Maranatal & Ratmono, 2017). Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menemukan 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Kemudian, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) juga menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah (Widyastuti, Sujana, & Adiputra, 2015). Berdasarkan Laporan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan masih terdapat daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat 86 LKPD menerima opini Dengan Pengecualian (WDP), dan 13 LKPD masih berstatus opini tidak memberikan Pendapat (Disclaimer). Oleh

sabab itu, masih terdapat permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Selain permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktik akuntansi, beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP). Setyaningrum & Syafitri (2012) membuktikan tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia memperoleh rata-rata 52.09% berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24/2005). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan LKPD di Indonesia berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Informasi yang diungkapkan pemerintah daerah pada LKPD seharusnya diungkapkan dengan lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan karena akan digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan (Rahim & Martani, 2016), dalam prespektif lain sektor swasta instrument kinerja ini juga merupakan hal yang penting untuk kepentingan pemilik perusahaan (Putra & Rahayu, 2020). Dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pelaksanaan pemerintahan harus didasarkan kepada tujuan tersebut. Namun seringkali pelaksanaan pemerintah hanya berfokus kepada kepentingan aparat pemerintah itu sendiri sehingga tujuan pelaksanaan pemerintahan tidak tercapai.

Fenomena hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat tersirat dalam Agency theory yang menjabarkan hubungan antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai agent yang beraktivitas atas kepentingan pihak lainnya sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). Pada sektor swasta nilai informasi sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan (Syofyan et al., 2021; Sofyan et al., 2020). Jika dikaitkan ke dalam bidang pemerintahan, pemerintah dapat dikategorikan sebagai agent sedangkan masyarakat sebagai principal, sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah harus tersedia bagi masyarakat (Rahim & Martani, 2016). Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya. Informasi pengelolaan daerah digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Kewajiban pelaporan ini dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan akuntansi pada pemerintah daerah dapat disebabkan berbagai kondisi dan faktor tertentu yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pemerintahan tersebut. Hendry (2000) menyebutkan bahwa kondisi sosioekonomi suatu daerah seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas pemerintah, dan pendapatan sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengimplementasikan aturan maupun berbagai kebijakan-kebijakan. Kemudian, Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) menyatakan organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Senada dengan hal ini, Christiaens & Peteghem (2007) meneliti reformasi akuntansi pemerintah daerah, dan menemukan bukti bahwa daerah yang lebih besar akan semakin unggul terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi akuntansi. Kemudian, Patrick (2007) menemukan bukti bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan sebuah inovasi administratif

Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34. Oleh sebab itu, dari prespektif keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah daerah dan praktek akuntansi pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi daerah tersebut.

Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor Sosioekonomi berdasarkan Kemandirian daerah, Tingkat kesejahteraan, dan Ukuran Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi di Pemerintahan Sumatra Barat. Hendry (2000) mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya dan kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan aturan maupun kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi suatu daerah (Hendry,2000), oleh sebab itu penelitian ini akan mengidentifikasi Provinsi Sumatra Barat. Sumatra Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 kota, dengan demikian terdapat 19 Kabupaten/Kota di pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, maka masing-masing kota/kabupaten harus mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu Yulianingtyas (2010) menyebutkan semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, dan struktur suatu daerah maka akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut, sehingga Kabupaten/Kota dengan aset yang lebih besar akan lebih mungkin untuk memenuhi SAP daripada pemerintah daerah dengan aset daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu kondisi sosioekonomi Provinsi Sumatra Barat terhadap pengungkapan informasi akuntansi penting untuk diidentifikasi.

Penelitian sebelumnya, Christiaens & Peteghem (2007) meneliti reformasi akuntansi pemerintah daerah, dan menemukan bukti bahwa daerah yang lebih besar akan semakin unggul terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi akuntansi. Sejalan dengan itu, Patrick (2007) menemukan bukti bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan sebuah inofasi administratif *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34*. Selanjutnya, Fitriyani & Yuliana (2010) meneliti praktik akuntansi pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Meraka menemukan bukti bahwa kondisi Kemandirian daerah, Tingkat kesejahteraan, dan Ukuran Daerah berpengaruh terhadap praktik akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) daerah diukur dari tingkat kesejahteraan daerah dan kemandirian daerah. Dalam nada yang sama, Maulana (2015) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pulau Jawa. Selanjutnya, Hendriyani & Tahar (2015) menemukan bukti bahwa jumlah penduduk atau populasi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan prespektif *Agency theory* beserta dokumentasi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum kondisi sosioekonomi akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi akuntansi.

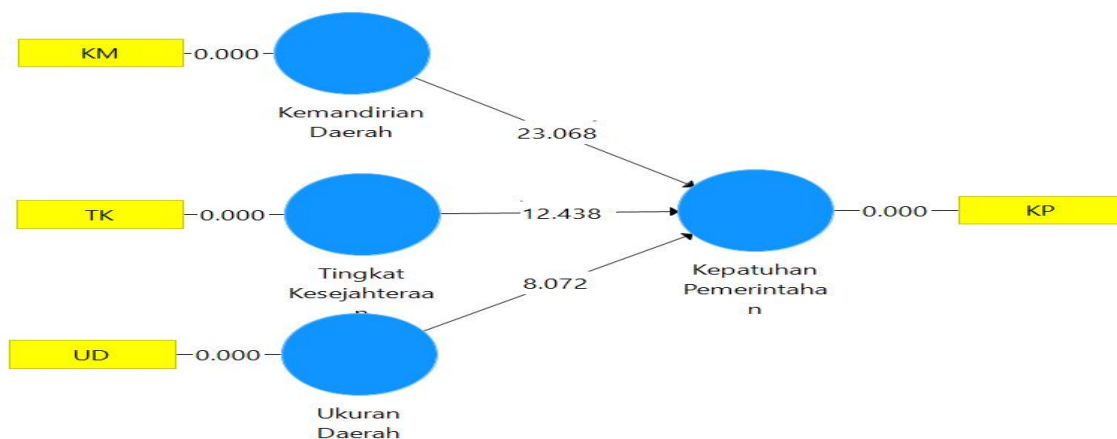
METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Sumatra barat, Kota/Kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Barat berjumlah 19 Kota/Kabupaten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2018-2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI) dan berbagai data lainnya. Alasan pemilihan tahun 2018-2020 adalah karena tahun terbaru yang memiliki data hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik akuntansi pemerintahan daerah yang diukur dengan *compliance index* (indeks kepatuhan). Indeks kepatuhan yang digunakan diadopsi dari indeks yang dikembangkan oleh Christiaens (1999) dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi dan regulasi di Indonesia.

Ukuran adalah jumlah penduduk atau populasi sebagai proksi untuk ukuran pemerintahan daerah, Cheng (1992). Daerah dengan populasi yang semakin besar diasumsikan akan semakin tinggi kompleksitas. Hendry (2000) mengasumsikan semakin tinggi kompleksitas diprediksikan akan menggunakan sumber pendanaan eksternal lebih besar pula. Ukuran sosioekonomi berikutnya dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita, Cheng (1992) menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator perkembangan sosioekonomi. Penelitian sebelumnya (Hendry, 2000) berasumsi bahwa pendapatan per kapita yang semakin tinggi memberikan sinyal peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan secara internal yang lebih besar.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (Partial Keast Square/ PLS) untuk menguji ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variable. PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas (Putra et al., 2021). Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga variabel laten yang dibentuk dengan indikator *formative*. Model *formative* mengasumsikan bahwa setiap indikatornya menjelaskan karakteristik konstruknya, dimana arah hubungan dari indikator ke konstruk (Ghozali, 2015). Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data Diolah 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai tertinggi, terendah, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Statistik deskriptif terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
Ukuran_Daerah	57	374446	278480	54571	3239464	362326
Tingkat_Sejahtera	57	26853421	16523041	1086961	333582351	31893256
Kemandirian_Daerah	57	0.122	0.11	0.3	0.93	0.108
Kepatuhan Pemerintahan	57	0.712	0.85	0.62	0.90	0.067

Sumber : Data Diolah 2022

Sebagaimana dilihat pada Tabel 1 bahwa Kepatuhan pemerintahan laporan keuangan daerah di 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera pada tahun 2018-2020 adalah 0.712 atau 71.2 %. Tingkat kepatuhan pemda terendah adalah sebesar 0.61 atau 61% yaitu pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nilai Tingkat kepatuhan pemda tertinggi mencapai 0.90 atau 90% pada Kota Bukittinggi. Dapat dilihat bahwa rata-rata ukuran daerah di 57 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat pada tahun 2018-2020 adalah sebesar 374446. Nilai standar deviasi ukuran daerah sebesar 362326. Ukuran daerah terendah adalah sebesar 54571 yaitu pada Pemerintah Kota Mentawai. Nilai ukuran daerah tertinggi mencapai 3239464 pada Kota Solok.

Penelitian ini menggunakan alat uji hipotesis dengan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) melalui program smartPLS 3.0. Model pada pengujian *Partial Least Square* ditunjukkan pada *Measurement model*. *Measurement model* adalah suatu proses dari *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk mengidentifikasi hubungan pada setiap indikator dari variabel penelitian dengan masing-masing variabel lainnya dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. *Discriminant validity* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai akar AVE setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Outer Model

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Ukuran_Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000
Tingkat_Sejahtera		1.000		
Kemandirian_Daerah		1.000		1.000
Kepatuhan Pemerintahan	1.000	1.000	1.000	

Sumber : Data Diolah 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk 1,000 lebih tinggi daripada korelasi konstruk. Jadi semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*. Setelah pemeriksaan outer model terpenuhi, selanjutnya melakukan penilaian terhadap inner model. Pemeriksaan ini meliputi signifikansi hubungan jalur dan nilai

R Square (R2) untuk melihat hasil evaluasi model structural. Nilai R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependennya. Nilai R2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pemerintahan	0.471	0.451

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai *R-square* variabel praktik akuntansi pemerintah daerah (Y) dijelaskan sebesar 0,471. Hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan dijelaskan oleh variabel sosio ekonomi, politik dan eksternal sebesar 47,1%, sedangkan sebesar 53,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penilaian terhadap *inner weight* dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar konstruk laten dengan memperhatikan hasil estimasi koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya. *Inner weight* juga menunjukkan hasil pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat besarnya nilai t statistik. Apabila nilai t statistik > t tabel, maka hipotesis akan diterima. Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat pada *result for inner weight* yang disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Path Coefficients

	P Values
Kemandirian Daerah -> Kepatuhan Pemerintahan	0.002
Tingkat_Sejahtera -> Kepatuhan Pemerintahan	0.025
Ukuran Daerah -> Kepatuhan Pemerintahan	0.013

Sumber : Data Diolah 2022

Hipotesis pertama menguji kemandirian daerah terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value kemandirian daerah terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0,002. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan karena p-value < 0,05 (0,002 < 0,05) sehingga hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua menguji Tingkat kesejahteraan Daerah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value tingkat kesejahteraan terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0.025.

Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan karena p-value < 0,05 (0,025 < 0,05) sehingga hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga menguji ukuran daerah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value ukuran daerah terhadap Hal tersebut membuktikan bahwa politik tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi pemerintah daerah sebesar 0.013. Dari hasil ini dinyatakan p-value < 0,05 (0.013 < 0.05) sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut

membuktikan bahwa faktor sosio ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosio ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil temuan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bukti bahwa Kesejahteraan daerah, Kemandirian daerah (Fitriyani & Yuliana, 2010), dan ukuran daerah (Maulana, 2015; Hendriyani & Tahar, 2015) berpengaruh terhadap praktik akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, dan semakin luas ukuran daerah maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam mengungkapkan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi suatu daerah dapat menjadi tolok ukur kepatuhan pengungkapan pada praktik akuntansi pemerintah daerah.

Tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan investasi yang baik sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi pemerintahan karena memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan kewajibannya. Oleh sebab itu kabupaten/kota akan melaporkan kinerja dan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik dan tidak memanfaatkan keuntungan potensi skala ekonomi dari pelaporan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan teori keagenan Jensen & Meckling (1976) akan timbul masalah *moral hazard* karena pemerintah daerah sebagai *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dengan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Masyarakat sebagai *principal* berhak mengetahui seluruh informasi yang mengenai penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan ke *agent* sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, rata-rata tingkat praktik akuntansi keuangan pada pemerintah daerah berada dalam kondisi yang cukup memuaskan yaitu 2018-2020 adalah 0.712 atau 71.2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan daerah pada awal masa reformasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 dibandingkan saat ini yang dimana tren persentasi indeks kepatuhan pengungkapan pada LKPD secara rata-rata meningkat menjadi lebih baik setiap tahunnya. Terdapat pengaruh variabel Kemandirian daerah, Tingkat kesejahteraan, dan Ukuran Daerah terhadap kepatuhan pengungkapan laporan keuangan daerah di pemerintahan kota/kabupaten di Sumatra barat.

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan yang disampaikan dapat berfungsi secara maksimal sebagai salah satu media pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, pemerintah daerah

hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor yang ikut mendukung dan mempengaruhi praktik tersebut. Keterbatasan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu jumlah pemerintah daerah yang diteliti masih belum menyeluruh kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia karena hanya pada kawasan saja yaitu Sumatera barat. kemungkinan terdapat perbedaan kondisi geografis dan kondisi ekonomi di wilayah provinsi lain, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mendeskripsikan provinsi lain belum dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk dapat menjelaskan secara luas dalam memberikan gambaran yang lebih baik terkait praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiaens, J. (1999). Financial accounting reform in Flemish municipalities: An empirical investigation. *Financial Accountability & Management*, 15(1), 21-40.
- Christiaens, J., & Van Peteghem, V. (2007). Governmental accounting reform: evolution of the implementation in Flemish municipalities. *Financial Accountability & Management*, 23(4), 375-399.
- Cheng, R. H. (1992). An empirical analysis of theories on factors influencing state government accounting disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 11(1), 1-42.
- Fitriyani, D., & Yuliana (2010). Analisis Praktek Akuntansi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 12(2), 9-16.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris. *BP Undip. Semarang*.
- Henry, B. K. (2000). An empirical investigation of the initial production of state government financial reports in conformance with generally accepted accounting principles (GAAP).
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1-11.
- Maranatal, L., & Ratmono, D. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Sap oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 244-255.
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government* (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).

- Putra, D. G., & Rahayu, R. (2020). Peranan implementasi tata kelola teknologi informasi (IT governance) sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 10(1), 01-07.
- Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The influence of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation system on company performance mediated by organizational capabilities. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 221-241.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemerintah Daerah, dan karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 24-27.
- Sofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020, November). Does the Information on the Internet Media Respond to the Stock Market?. In *The Fifth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020)* (pp. 510-520). Atlantis Press.
- Syofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020). Influence Of Company Value Information, Dividend Policy, And Capital Structure On Stock Price. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 5(2), 152-169.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 1-18.
- Widyastuti, N. M. A., Edy Sujana, S. E., Adiputra, I. M. P., & SE, S. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 3(1). 1-21.
- Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia).